

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 026/KMA/SK/II/2012
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN DALAM
PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA PERDATA
(Studi Komparatif di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



OLEH :

NAMA : MUHAMMAD SYAIFUDIN KAMAL

NIM : 2013-20-041

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2017

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syaifudin Kamal
NIM : 2013-20-041
Alamat : Ds. Papringan Rt.01 Rw.03 Kecamatan Kaliwungu
Kabupaten Kudus.
Judul Skripsi : Implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan dalam
Pemungutan Biaya Perkara Perdata (Studi Komparatif
di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama
Kudus)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi dan bagian-bagian yang terdapat dalam isi skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya adalah benar-benar hasil karya sendiri dan pengutipan sumber referensi dilakukan sesuai dengan etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan diatas saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai / berbeda dengan pernyataan di atas maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Kudus, 19 Agustus 2017

Mahasiswa yang bersangkutan,



Muhammad Syaifudin Kamal

HALAMAN PENGESAHAN

**“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 026/KMA/SK/II/2012
TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN DALAM
PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA PERDATA
(Studi Komparatif di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus)”**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)
Ilmu Hukum dengan kekhususan
HUKUM PERDATA

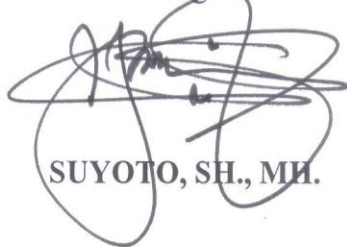
Oleh:

**MUHAMMAD SYAIFUDIN KAMAL
NIM : 2013-20-041**

Kudus, 19 Agustus 2017

Disetujui

Pembimbing I



SUYOTO, SH., MH.

Pembimbing II



SUCININGTYAS, SH., MHum

Mengetahui



Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. SUKRESNO, SH, MHum

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Ilmu ada tiga tahapan, jika seseorang memasuki tahap pertama dia akan sombong, jika dia memasuki tahap kedua dia akan tawadu’ (rendah hati), dan jika dia memasuki tahap ketiga dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya” .

(Umar Bin Khatab)

“Fiat Justitia Ruat Caelum, Keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus).

Kupersembahkan untuk :

1. Kedua orangtuaku tercinta,
2. Keluarga besarku terbaik,
3. Orang terkasih,
4. Teman – teman seperjuangan,
5. Sahabat- sahabat,
6. Almamater,

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan Inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN DALAM PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA PERDATA (Studi Komparatif di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus)”**.

Penulisan skripsi ini adalah dalam rangka melengkapi dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Penulis menyadari selama pembuatan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Sukresno SH., Mhum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Suyoto, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Yusuf Istanto, SH., MH. dan Ibu Suciningtyas, SH., Mhum. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tidak lelah membimbing, menasehati, memotivasi dan mengarahkan sehingga penulisan skripsi ini dapat tersusun.
3. Ibu Suciningtyas, SH., MHum. selaku Dosen Wali yang tanpa lelah selalu membimbing, menasehati, memotivasi dan mencurahkan kasih sayangnya

kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ali Achmadi (Alm) dan Ibu Djami'atun yang telah memberikan segalanya kepada Penulis, semoga Penulis dapat menjadi anak yang membanggakan beliau.
6. Bapak Moh. Jama'ah Wl, SH., Paman dan orang tua ke dua sekaligus mentor terbaik yang mengajari Penulis berbagai hal, baik dalam hal ilmu pengetahuan hukum maupun segala hal yang dibutuhkan dalam hidup.
7. Kakak-kakaku Hariyati, Siti Noor Qomariyah, Tri Untari Puspaningrum yang telah berjuang bersama untuk dapat terus melanjutkan hidup.
8. Seluruh keluarga besar yang bahu-membahu selalu bersama dalam senang maupun susah.
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 19 Agustus 2017

P e n u l i s

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 026/KMA/SK/II/2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN PERADILAN DALAM PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA PERDATA (Studi Komparatif di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus)”** ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dalam Pemungutan Biaya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus, selain itu juga untuk mengetahui Upaya Pengadilan Negeri Kudus, Pengadilan Agama Kudus untuk mewujudkan Keterbukaan Lembaga Peradilan dalam Pemungutan Biaya Perkara Perdata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Setelah data diperoleh, disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas untuk selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan Implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dalam Pemungutan Biaya Perkara Perdata antara di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus terletak pada komponen-komponen dan besaran komponen biaya perkara yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua masing-masing Pengadilan, selain itu Pengadilan Agama Kudus mengakomodir pembayaran panjar biaya perkara secara langsung di Pengadilan sementara di Pengadilan Negeri Kudus harus melalui pihak bank. Di satu sisi kebijakan Pengadilan Agama Kudus tersebut mempermudah Pemohon / Penggugat, namun di sisi lain bertentangan dengan aturan yang ada. Upaya Pengadilan Negeri Kudus untuk mewujudkan Keterbukaan Lembaga Peradilan dalam Pemungutan Biaya Perkara Perdata adalah dengan Penempatan papan informasi di lingkungan Pengadilan, Pelayanan Secara *Online* dan akan menempatkan pelayanan di Lobi Pengadilan (*One Stop Service*), sementara Pengadilan Agama Kudus adalah dengan Penempatan papan informasi di lingkungan Pengadilan, Akses Informasi Secara *On line*, dan Pelayanan di Lobi Pengadilan (*One Stop Service*).

Kata Kunci : *Implementasi, Pemungutan Biaya Perkara, Perkara Perdata*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Perkara Perdata	11
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata.....	15
C. Tinjauan Umum tentang Biaya Perkara.....	24
D. Tinjauan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara	38
E. Tinjauan tentang Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Metode Pendekatan.....	44
B. Spesifikasi Penelitian.....	44
C. Metode Penentuan Sampel	44
D. Metode Pengumpulan Data.....	45

E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data	47
F. Metode Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Implementasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dalam Pemungutan Biaya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kudus dan Pengadilan Agama Kudus.....	49
B. Upaya Pengadilan Negeri Kudus, Pengadilan Agama Kudus untuk mewujudkan Keterbukaan Lembaga Peradilan dalam Pemungutan Biaya Perkara Perdata.....	99
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	